

Santunan Ahli Waris Virus Korona

SALATIGA (KR) - Pemkot Salatiga memberikan santunan kepada ahli waris warga terkonfirmasi positif virus korona yang meninggal, sebesar Rp 15 juta. Sekretaris Daerah (Sekda) Salatiga Fakruroji dalam suratnya, mengatakan pemberian santunan didasarkan pada program Direktorat Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dapat diterapkan dalam penanganan, perlindungan sosial bagi korban meninggal dunia akibat virus korona. Selain itu, juga berdasarkan surat Gubernur Jateng Nomor 466.11/1232 tanggal 28 Agustus 2020 perihal penanganan perlindungan sosial bagi korban meninggal dunia akibat virus korona. "Santunan Rp 15 juta diberikan kepada ahli waris korban meninggal yang dinyatakan oleh rumah sakit/Puskesmas serta DKK Salatiga," jelas Fakruroji, Selasa (20/10).

Menurutnya, persyaratan yang harus dipenuhi ahli waris adalah, foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) ahli waris korban, foto copy surat keterangan meninggal dunia (kematian) dari rumah sakit, foto copy surat keterangan hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas, laboratorium atau klinik (rekam medis) korban, yang dinyatakan meninggal karena virus korona. Sementara itu, kasus virus korona di Salatiga tiga hari ini meningkat. Pada Selasa (20/10), dari data di DKK Salatiga jumlah pasien yang dirawat sebanyak 34 orang, sembuh 257 orang dan meninggal dunia 5 orang. (Sus)

Calon Walikota Semarang Kena Teguran

SEMARANG (KR) - Video calon Walikota Semarang yang juga petahana, Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi, tertangkap kamera video saat nyanyi tanpa menggunakan masker. Video tersebut viral di media sosial, dan langsung mendapat respons dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Senin (19/10) Ganjar Pranowo langsung menegur Walikota Semarang non aktif tersebut melalui telepon. Kepada wartawan Ganjar Pranowo mengatakan sudah merespons kejadian itu dan mengingatkan secara langsung. "Sudah saya kontak pak Hendi. Dia minta maaf dan bilang sebenarnya itu cuma sebentar. Saya katakan ya enggak, karena mestinya diingatkan juga," tegas Ganjar. Ganjar mengingatkan seperti kejadian Bupati Blora juga nyanyi tanpa menggunakan masker dan langsung ditegur. Ganjar mengatakan, Hendi sebagai kepala daerah seharusnya bisa memberi contoh pelaksanaan protokol kesehatan yang baik kepada masyarakatnya.

"Sama dengan di Blora juga gitu. Mari kita memberi contoh yang baik kepada masyarakat soal penerapan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19. Saat Walikota Semarang saya telepon, dia bilang iya mas saya minta maaf, sebenarnya cuma sebentar dan hanya pendek. Iya, tapi karena tidak pakai (masker) dan ada yang merekam, jangan kasih contoh yang buruk," tegasnya. Seperti viral di media sosial, calon Walikota Semarang petahana, Hendrar Prihadi kedapatan bernyanyi tanpa mengenakan masker. (Bdi)

KPM Bakal Terima Bantuan Beras

GROBOGAN (KR) - Sebanyak 63.807 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan bakal menerima bantuan sosial beras (BSB). Bantuan diberikan terkait dampak pandemi Covid-19. "Jumlah KPM sebanyak itu nantinya akan mendapat bantuan beras untuk masa penyaluran tiga bulan. Tiap bulan, bantuan beras yang diberikan untuk tiap KPM sebanyak 15 kg," ungkap Koordinator KPH Kabupaten Grobogan, Abdulah Zaini, Selasa (20/10). Sebelumnya, peserta PKH mendapat bantuan uang tunai, dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Di masa pandemi, bantuannya ditambah dengan beras. Nantinya, bantuan beras akan disalurkan melalui Bulog. Dijelaskan, bantuan beras dijadwalkan diberikan selama tiga bulan. Yakni, mulai Agustus, September, dan Oktober yang disalurkan dalam dua tahap.

"Bantuan tahap I sudah kita salurkan pada 5 hingga 9 Oktober lalu, yang merupakan jatah beras untuk bulan Agustus dan September. Sedangkan penyaluran tahap II, akan kita salurkan pada tanggal 21 hingga 23 Oktober 2020. Ini merupakan bantuan khusus untuk bulan Oktober. Jadi beras yang diterima tiap KPM pada tahap satu kemarin langsung 30 kg," terang Zaini. Kepala Cabang Perum Bulog Semarang, Titov Agus Sabelia menjelaskan, beras yang disalurkan untuk KPM KPH kualitasnya masuk katagori medium, sama dengan beras bantuan program lainnya yang sudah disalurkan Bulog. (Tas)

BPBD Tetap Dropping Air Bersih



Sri Yuwana HY

KLATEN (KR) - Kendati telah mulai turun hujan, BPBD Kabupaten Klaten tetap melakukan dropping air bersih hingga pekan pertama bulan Nopember 2020. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Klaten Sri Yuwana Haris Yulianto, Rabu (21/10) mengemukakan, dropping air masih berjalan, dan direncanakan sampai satu minggu di Bulan November. Total anggaran dropping air sebanyak Rp 242 juta lebih. Untuk 1000 tangki, masing-masing tangki dengan kapasitas 5.000 liter.

"Meskipun pekan itu sudah masuk darurat siaga banjir, namun dropping air tetap dilakukan. Hal ini dengan alasan, sumber air sumur gali baru bisa diambil airnya atau terisi jika hujan terus menerus minimal 10 hari atau dua minggu," kata Yuwana Haris. Selain itu, bagi warga lereng Merapi, dua minggu pertama turun hujan masih untuk membersihkan genteng-genteng dan bak penampungan. Menurut Yuwana Haris, kekeringan di wilayah Kabupaten Klaten tahun 2020 tidak seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 42 desa di 9 kecamatan, sedangkan tahun 2020 hanya terdapat 19 desa di 5 kecamatan.

Kekeringan tahun 2020 jangka waktu tidak terlalu panjang dan kondisinya tidak terlalu kering. "Tahun ini BPBD hanya dropping air di 19 desa, yang merupakan potret riil dari kondisi desa kita yang membutuhkan air bersih. Jumlah bisa naik bisa turun, mungkin tahun 2021 tidak seperti tahun ini," jelas Yuwana Haris. Yuwana haris menjelaskan, dalam tertib administrasi, sudah ada SK Bupati terkait status siaga musim kekeringan. (Sit)

Polda Jateng Siap Amankan Pilkada Serentak

SEMARANG (KR) - Polda Jateng bersiap menanggulangi gangguan kamtibmas menjelang akhir tahun 2020 dan Pilkada Serentak 2020 di Jateng. Berbagai persiapan dan upaya telah dilakukan demi terciptanya stabilitas kamtibmas. Salah satunya melaksanakan pelatihan pra tugas sebagai Dalmas Kerangka (Gabungan Satker), Rabu (21/10) di Hotel Oaktree Semarang.

Kapolda Jateng Irjen Pol Achmad Lutfi mengakui pelatihan bagi Dalmas Kerangka cukup penting. Langkah ini, sekaligus untuk mengingatkan kembali (refresh) agar anggota semakin profesional dalam melaksanakan tugas di lapangan serta memiliki gambaran apa yang harus dilakukan saat menghadapi massa. "Tujuan latihan ini tentu saja untuk menjaga keamanan, ketertiban agar

wilayah hukum Polda Jateng tetap kondusif dan terpelihara," jelas Ahmad Luthfi didampingi Waka Polda Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji.

Pucuk pimpinan jajaran Polda Jateng pada acara pelatihan itu menyampaikan beberapa poin agar diperhatikan saat menjalani latihan. Di antaranya para peserta harus sungguh-sungguh dan mematuhi arahan pelatih agar tak terjadi kesalahan saat pelaksanaan tugas di lapangan. Dituntut mempelajari pedoman perkab No 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Perkab 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindak Kepolisian.

Selain itu, tidak kalah pentingnya menjaga kondisi fisik tetap prima sehingga sewaktu saat dibutuhkan siap digerakkan untuk melaksa-

nakan tugas. Keempat, se-

luruh personil paham ten-

gah tahapan dalam pe-

mampu menerapkannya di

lapangan. (Cry)



Kapolda Jateng bersama jajaran siap amankan Pilkada serentak.

KR-Karyono

303 Warga Terdeteksi Dobel Data Kependudukan

PURWOREJO (KR) - Sebanyak 303 warga Kabupaten Purworejo terindikasi dobel data kependudukan. Mereka telah melakukan perekaman data KTP elektronik di daerah lain, namun mencoba melakukan hal serupa di Purworejo.

Pemerintah memberi catatan khusus kepada mereka dan tidak bisa mencetak KTP elektronik untuk warga bersangkutan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purworejo Ahmad Kasinu mengatakan, warga merekam ulang karena mereka lupa atau berusaha menutupi jati dirinya.

"Ada yang mengaku kepada petugas jika belum merekam data, lalu setelah direkam dan data dikonfirmasi ke pusat, ternyata yang bersangkutan telah melakukan perekaman data di tempat lain," katanya kepada KR, Rabu (21/10).

Selain itu, ada perekaman data yang gagal karena warga menggunakan lensa kontak. Pola iris

mata warga tidak terdeteksi dengan benar karena terhalang lensa itu.

Menurutnya, untuk warga yang pernah melakukan perekaman data, tidak perlu melakukannya lagi.

Data kependudukan yang bersangkutan telah terekam di pusat data pemerintah, sehingga tinggal mencetak ulang apabila KTP elektroniknya rusak atau hilang.

Kasinu menambahkan, pemkab sedang mengoptimalkan perekaman data KTP elektronik. Disdukcapil turun ke desa melaksanakan program dengan target seratus titik di 16 kecamatan.

Program jemput bola itu dilaksanakan sejak September hingga 30 November 2020. "Sudah sekitar delapan kecamatan yang didatangi petugas, wajib KTP yang belum merekam data di beberapa desa sekitar lokasi diundang untuk hadir," tuturnya.

Program tersebut menasar wajib KTP yang belum melakukan perekaman, berusia 17 tahun hingga 9 Desember 2020, atau warga belum 17 tahun tapi merencanakan pernikahan sebelum 9 Desember 2020.

"Sehingga harapannya mereka nanti memiliki hak pilih dalam Pilkada 2020," ucapnya. (Jas)

Pengembangan Wisata Dongkrak Ekonomi Warga

MAGELANG (KR) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbangda Kabupaten Magelang, menggelar kegiatan Penguatan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Magelang, Selasa (20/10).

Salah satu tujuannya, untuk mencari data terkait dengan pengembangan destinasi wisata guna mendorong ekonomi warga sekitar destinasi.

"Dalam kegiatan ini peserta melakukan survei dan observasi langsung ke lapangan, sehingga akan mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam hal ini adalah destinasi wisata di wilayah Grabag dan Ngablak, untuk mencari informasi terkait apa saja yang dibutuhkan untuk destinasi wisata tersebut," kata Kepala Bappeda Kabupaten Magelang, Sugiyono.

Survei tersebut mengacu kepada holistik, tematik, terpadu, dan berbasis komunitas, dimana masyarakat harus ikut memiliki, ikut menjaga dan mengembangkan, sehingga menjadi kebutuhan.

Secara teknis pertanyaan survei berisi spasial tata ruang, budi daya dan perlindungan. Adapun ujungnya untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam survei ini juga melibatkan beberapa SKPD terkait, termasuk komunitas pariwisata dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Magelang.

Secara teknis survei, Dinas Per-

hubungan konsentrasi dari sisi aksesibilitas, DPU PR sisi infrastruktur dan destinasi buatan, Disdikbud sisi cagar budaya dan seni budaya, Dinas Pertanian sisi Argowisata, BPBD mitigasi bencana.

Setelah disurvei kemudian data di workshop, data yang dihimpun tersebut akan digunakan sebagai acuan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang.

"Ada tim kecil yang menyusun buku laporan, kemudian di workshop dengan peserta yang sama untuk disempurnakan. Setelah itu akan dilaporkan kepada Pak Bupati Magelang. Buku tersebut sebagai pertimbangan Bupati untuk mengambil kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang," lanjut Sugiyono, yang pada hari tersebut bersama rombongan melakukan survei dan observasi ke destinasi wisata Gunung Andong, Candi Umbul, Air Terjun Sumuran Selogriyo, Embung Pagergunung dan Gunung Telomoyo, dengan menggunakan kendaraan jeep wisata.

Sugiyono menambahkan, kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan melakukan survei dan observasi ke destinasi wisata wilayah Barat dan Selatan Kabupaten Magelang.

"Hari ini kita melakukan kegiatan di wilayah utara dan timur Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya di wilayah barat dan selatan. Jadi kegiatan ini dibagi dalam tiga tahap," imbuhnya. (Bag)

Sosialisasi Prokes Terus Dilakukan

GROBOGAN (KR) - Antisipasi penyebaran dan penularan virus korona di Kabupaten Grobogan, Polres bersama Kodim 0717 Purwodadi gencar melakukan sosialisasi protokol kesehatan (prokes). Sosialisasi digelar untuk mengajak masyarakat agar selalu bisa menjaga kesehatan keluarga masing-masing. Salah satunya adalah dengan membiasakan M3 dalam aktivitas sehari-hari. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ajakan tersebut disampaikan hingga level bawah yaitu melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang terjun langsung di wilayah binaan.

Seperti yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Godong bersama Babinsa Koramil Godong menyambangi warga di wilayah binaan guna sosialisasi protokol kesehatan. "Kita (TNI-Polri) tidak bosan mengajak warga membiasakan M3. Dengan cara itu harapan kita bisa mencegah penyebaran dan penularan Covid-19," ungkap Kapolsek Godong Iptu Daryanto, Selasa (20/10). Sesuai instruksi dari Kapolres Grobogan AKBP Jury Leonard Siahaan, setiap anggota Polri harus aktif dalam tugas kemanusiaan penanganan Covid-19, yang tentunya dengan menjalin sinergi dengan TNI, dan Pemkab Grobogan. "Untuk itulah kami selalu mendorong anggota terutama Bhabinkamtibmas agar aktif melakukan sosialisasi prokes," terangnya. (Tas)



Petugas Polsek dan Koramil Godong Grobogan mensosialisasi prokes

KR-M Taslim

Unimus Ground Breaking Pembangunan Rumah Sakit

SEMARANG (KR) - Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Prof Dr H Masrukhi MPd bersama Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Unimus Widadi SH dan Dekan Fakultas Kedokteran Unimus dr dr Wahyu Budi Martono SPTH-KL MSi tepat pukul 10.00 tanggal 20 bulan 10 tahun 2020 menekan sirene 'ground breaking' dimulainya pembangunan gedung Rumah Sakit Pendidikan Unimus seluas 2,5 hektare di kawasan kampus induk Unimus Jalan Kedungmundu, Selasa (20/10).

Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya kepala Dinas Penataan Ruang kota Semarang (Mo-

hammad Irwansyah ST MT), Camat Tembalang yang diwakili oleh Lurah Kedungmundu (H Nur Rohim SH), anggota DPR RI Komisi 9 (Dr H Edy Wuryanto SKP MKep) dan pejabat teras di lingkungan Unimus.

Rektor menyampaikan dengan dibangunnya Rumah Sakit Pendidikan tersebut nantinya selain untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat, juga akan menjadi pusat riset dan penelitian bagi bidang kesehatan sekaligus untuk proses pendidikan bagi Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat, juga Fakultas Kedokteran

Gigi. Semuanya akan terpadu dalam melakukan proses-proses pendidikan di Rumah Sakit yang akan dibangun dengan target penyelesaian 3 tahun ke depan sudah beroperasi. Artinya keberadaan RS Pendidikan Unimus selain sebagai lab dan pembelajaran 4 fakultas kesehatan di Unimus (FK,FKG, FKM dan Fikes) juga sebagai sarana layanan pada masyarakat umum.

"Dalam proses pembangunan Rumah Sakit Pendidikan harus sesuai standar yang ada dan ketentuan dari kementerian kesehatan dengan menujui padatan tipe B dengan syarat kesiapan lahan minimal

1,5 hektare, sementara itu Unimus telah menyiapkan lahan 2,5 hektare. Harapannya selain adanya Gedung Rumah, tanah yang luas bisa ditata

pemanfaatan lahan sebagai taman sehingga bisa menjadi kompleks rumah sakit yang sehat dan menyenangkan," ujar Rektor. (Sgi)



Rektor dan para pimpinan Unimus lainnya berpose usai ground breaking RS.

KR-Sugeng Irianto